

ANALISA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Sri Maryanti

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning - Pekanbaru

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perkembangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta kaitannya dengan pembangunan di Provinsi Riau. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Riau. Hasil penelitian adalah pertumbuhan ekonomi meningkat namun kontribusi sektor A (*Agriculture*) menurun digantikan sektor M (Manufacture) dan sektor S (Service) semakin tinggi, tingkat kemiskinan paling banyak adalah dari sektor A (67, 49%) kemudian sektor S (21,40%) dan sektor M hanya 4,11%.

Key Words : Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengusahakan agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan pembangunan digunakan berbagai peralatan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen dari tingkat kehidupan atau indikator pembangunan karena pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila struktur ekonomi yang berat pada sektor pertanian diubah dengan menitikberatkan pada sektor industri. Tetapi bukan berarti suatu negara mengabaikan pembangunan sektor pertanian atau menurunkan sektor pertanian. Produksi sektor pertanian harus ditingkatkan karena bagaimanapun juga produksi juga akan menopang sektor industri.

Sektor industri merupakan sektor modern yang bersifat padat modal dengan menggunakan teknologi yang modern, tingkat produktifitas yang tinggi. Ini berarti bahwa seseorang yang bekerja pada sektor ini akan menerima pendapatan yang tinggi. Sedangkan sektor usaha tradisional pada umumnya bersifat padat karya, dengan menggunakan teknologi yang sederhana, produktifitas rendah, modal kecil dan segala rangkaian akibatnya.

Dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga berimbas kepada turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Riau. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi Riau pada periode 1995-2000 tanpa migas masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 6,76%. Sehingga bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi lain maka Riau masih menggembirakan. Namun tingkat kemiskinan di Riau juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, lalu ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan ini yang ingin mengurangi tingkat kemiskinan tapi hasilnya justru meningkatnya angka kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi yang serba kekurangan, yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh simiskin melainkan karena ketidakberdayaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Kemiskinan antara lain ditandai

Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin dari lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan jumlah penduduk 4.383.142 jiwa pada tahun 2000 di Provinsi Riau, sebanyak 10,38% adalah miskin. Dengan kata lain lebih dari 438.314 jiwa penduduk Riau adalah penduduk miskin. Kemudian pada tahun 2002 penduduk miskin di Riau telah bertambah menjadi 13,61% dari 51.473.300 jumlah penduduk atau hampir 700.000 penduduk di Riau adalah miskin (BPS, 2002).

Tingkat kemiskinan yang tinggi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Riau dengan pendapatan perkapita yang tinggi, tidak membuat turunnya tingkat kemiskinan tapi justru meningkatkan kemiskinan di Riau. Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut maka diperlukan suatu kebijaksanaan, komitmen serta program-program pembangunan yang tepat. Lebih dari itu diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu walaupun hanya sedikit. Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian dengan judul “ Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau”.

Adapun masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah a) bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, b) bagaimana tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, dan c) bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dengan pembangunan di Provinsi Riau

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: a) mengetahui keadaan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, b) mengetahui tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, dan c) untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai proses pembangunan di Provinsi Riau

Manfaat yang akan diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah: a) dapat mengetahui dan menganalisa laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Riau, dan b) memberikan sumbangan fikiran bagi perumusan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Riau, dalam upaya ,mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dari masyarakat dengan berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. (Sukirno, 1985:170)

Menurut M.L.Jhingan (2003:5) perkembangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang berarti mengembangkan potensi pendapatan nyata negara-negara terbelakang dengan menggunakan investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber-sumber produktif yang pada gilirannya

menaikan pendapatan nyata per-orang serta mentikberatkan pada perbaikan kesejahteraan material yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa.

Proses pembangunan ekonomi selalu ditandai dengan adanya perubahan terhadap pendaptan perkapita masyarakat dan berbagai macam transformasi struktur social ekonomi masyarakat. Proses transformasi structural atau proses perubahan komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor dan sub sektor merupakan salah satu yang penting dari proses pembangunan ekonomi suatu daerah. (Seswandi,2004:31)

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Menurut Arif Budiman (2000:2) masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi yang diukur dari Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) dan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerataan secara sederhana diukur dengan melihat persentase PNB yang diraih oleh penduduk, dimana 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% maka ketimpangan dianggap mencolok, kalau 40% penduduk termiskin menerima antara 12% sampai 17% ketimpangan dianggap sedang namun bila penerimaan golongan ini lebih dari 17% ketimpangan dianggap lumayan kecil. (Budiman,2000:4)

Aspek pertumbuhan ekonomi memegang peranan terpenting selaku indicator pembangunan suatu Negara. Bahkan tidak jarang pertumbuhan ekonomi diidentikkan pula dengan kesejahteraan dan tingkat kehidupan. Sebagian besar dari komponen pertumbuhan ekonomi ini berorientasi terhadap aspek konsumsi dari perkiraan pendapatan nasional. Komponen konsumsi ini dianggap lebih penting daripada komponen pendaptan, karena komopnen ini secara langsung akan mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kehidupan masyarakat.(Hendra Esmara,1986:29)

Menurut Gupta (1997:33) masalah pemerataan pendapatan akan tetap ada selama proses pembangunan berlangsung, hal ini juga disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas antara sektor leading (industry) dan sektor lagging (pertanian) semakin melebar yang pada akhirnya produktivitas akan mempengaruhi distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, oleh karena itu kebanyakan negara berkembang punya pilihan antara mengejar pertumbuhan ekonomi atau mencapai pemerataan, hal ini merupakan dilema karena antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan terjadi trade off artinya suatu negara ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pemerataan pendaptan diabaikan atau sebaliknya. .

Kemiskinan

Kemiskinan absolute dan ketidakmerataan mempunyai dampak negative secara umum terhadap pembangunan dan integrasi nasional, oleh karena itu muncul kembali program penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan. (Soemitro Remi dan Tjiptoherijanto,2002:22-23)

Taksiran keluarga miskin ada kaitannya dengan usulan DAU dan DAK pada pemerintah pusat agar dana yang masuk kedaerah jumlahnya besar, namun lebih mementingkan target-target angka untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan tekanan penduduk merupakan pertemuan antara produksi asli penduduk dengan program pemerintah misalnya dengan cara migrasi.(Mubiyarto,2002:2-3)

Hendra Esmara (1986:287) mengatakan apabila tingkat pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat

Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

dikatakan miskin. Sehingga dengan demikian tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin, atau biasa disebut garis kemiskinan. Konsep ini dikenal dengan kemiskinan mutlak (absolute). Walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekelilingnya, maka orang atau keluarga masih berada dalam keadaan miskin. Konsep ini dikenal dengan kemiskinan relative.

Tambunan (2001:100) menyatakan bahwa untuk mengatasi kemiskinan tersebut, jelas pemerintah bersama-sama pihak swasta (dunia usaha dan masyarakat) mempunyai peranan besar dalam usaha menghilangkan/mengurangi kemiskinan di tanah air. Untuk maksud ini diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti *cost effectiveness*-nya tinggi. Dalam hal ini ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan yakni sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan
- b) Pemerintahan yang baik (*good governance*)
- c) Pembangunan Sosial

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, hal ini didasarkan karena Riau merupakan provinsi yang tingkat pertumbuhannya tinggi dibanding dengan provinsi lainnya demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinannya, karena itu penulis ingin mengetahui sektor mana yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Riau.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau antara lain:

- a) Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Riau
- b) Pendapatan Domestik Regional Bruto Sektoral Provinsi Riau
- c) Jumlah Penduduk Provinsi Riau
- d) Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau
- e) Jumlah Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Riau

Dalam pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi (Pengamatan) yaitu pengamatan dilakukan terhadap perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk miskin melalui data sekunder yang ada di Provinsi Riau.

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dimana pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan dilakukan secara terpisah kemudian akan dilakukan penganalisaan hubungan keduanya, yaitu dengan menggunakan formula sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisa pertumbuhan ekonomi suatu negara dihitung dari laju Produk Domestik Bruto (PDRB) dalam jangka waktu tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan formula *Growth Theory*:

$$P_{t+n} = P_t (1 + r)^n$$

Dimana : P_{t+n} = PDRB tahun terakhir

P_t = Produksi tahun awal

r = Tingkat pertumbuhan pertahun

n = Waktu

b) Tingkat Kemiskinan

Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (*Proverty Gap Index-P1*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Distributionally Sensitive Indeks – P2*) yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (2004) menurut perkotaan dan pedesaan sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = 1/n \sum_{i=1}^q \frac{[z - y_i]^{\alpha}}{[z]}$$

Dimana : $\alpha = 0, 1, 2$

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah

garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$) $y_i < z$

q = banyaknya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah Penduduk

Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh Head Count Index (P_0), $\alpha = 1$ adalah Proverty Gap Index (P_1) dan $\alpha = 2$ merupakan *distributionally Sensitive Indeks* (P_2). Proverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 1993-2003 adalah 6,94% pertumbuhan yang tinggi ini tidak terlepas dari laju pertumbuhan masing-masing sektor yakni dari sector industry 10,04%, listrik 8,55% dan pengangkutan 7,99%. Sedangkan kontribusi masing-masing sector terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 1993-2003 adalah terdapat pada sector industry pengolahan yaitu pada 1993 sebesar 25,60% kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 34,10%. Kontribusi masing-masing sector terhadap PDRB dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: A (Agriculture), M (Manufacture) dan S (Service) dimana kontribusi sector yang paling tinggi pada tahun 2003 adalah M (Manufacture) sebesar 43,94% service atau jasa sebesar 38,28% dan A (Agriculture) sebesar 17,78%.

Persentase penduduk miskin tahun 1993-2003 mengalami fluktuasi yang sangat tidak mengembirakan, jumlah penduduk miskin tahun 1993 berjumlah 410.853 jiwa atau sebesar 11,20% dan tahun 2003 meningkat menjadi 658.600 jiwa atau sebesar 14,67%. Jumlah penduduk miskin untuk kabupaten/kota paling tinggi adalah kabupaten Indragiri Hilir sebesar 115.110 jiwa, sedangkan yang terendah adalah kota Dumai yaitu sebesar 21.300 jiwa. Ternyata dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah tanpa migas dengan pertimbangan bahwa walaupun UU otonomi daerah sudah dibuat, tetap saja hasil dari migas lebih banyak diserahkan kepada pusat (nasional), sehingga secara ekonomi hasil dari migas ini tidak banyak diserap oleh Riau. Dengan analisa data tanpa migas diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mewakili kondisi

Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

dan pembangunan ekonomi daerah riau. Hasil analisa laju pertumbuhan ekonomi tersebut diperoleh dari data pertumbuhan sektoral, pertumbuhan PDRB kabupaten/kota, PDRB perkapita dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan hasil analisa tingkat kemiskinan diperoleh dari data jumlah dan persentase penduduk miskin di kota dan desa, jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota se Provinsi Riau tahun 2003 dengan pembandingnya tahun 2001 dan 2002, serta persentase penduduk miskin menurut sector usaha tahun 2003.

Pembahasan

Pertumbuhan Sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi Riau dalam kurun waktu 1993-2003, tidak bisa dilepaskan dari tingginya pertumbuhan masing-masing sector. Jumlah semuanya ada Sembilan (9) sector, yaitu sector pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa. Pada tahun 1993 kontribusi terbesar adalah dari indstri pengolahan 25,60% yang kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 34,10%. Kemudian diikuti oleh sector pertanian 20,80% dimana pada tahun 2003 turun menjadi 17,79%. Sedangkan sector perdagangan pada tahun 1993 memberikan kontribusi 18,58% terhadap PDRB, dimana pada tahun 2003 menjadi 17,93%. Sebagai sebuah konsekuensi dari semakin tumbuh dan kembangnya sebuah daerah maka kontribusi sector pertanian yang dianggap sebagai sector tradisional akan semakin sedikit, digantikan oleh sector industry yang dianggap sebagai sector modern dan bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Provinsi Riau Tahun 1993-2003

Lapangan Usaha		Kontribusi		Pertumbuhan
		1993	2003	1993-2003
Pertanian	Kelompok Agriculture (A)	20.80	17.76	5.27
Pertambangan		2.44	2.64	7.81
Industri	Kelompok Manufacture	25.60	34.09	10.04
Listrik dan Air Minum		0.98	1.14	8.55
Bangunan	Kelompok Service (S)	6.52	6.07	6.18
Perdagangan		18.58	17.93	6.56
Pengangkutan		6.68	7.37	7.99
Keuangan		10.08	6.31	2.04
Jasa		8.32	6.67	4.59
Total		100.00	100.00	6.94

Sumber: BPS, Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Menurut Sektor Tahun 2004

Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 1993-2003 masing-masing daerah kabupaten/kota di Riau, rata-rata menunjukkan 6,94% dengan laju pertumbuhan tertinggi periode 1993-2003 adalah Batam (10,29%), kemudian Pekanbaru (7,24%). Pertumbuhan PDRB yang negative terdapat di Kepulauan Riau (Kepri) yaitu 4,55%. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya sumberdaya yang sebelumnya mendatangkan sumber pendapatan bagi Kepri tidak lagi bisa dilakukan, misalnya penambangan pasir laut, yang bila dilanjutkan akan berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar. Adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota baru juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan kabupaten/kota asal. Dalam hal ini bagi

kabupaten/kota asal pemekaran, pasca pemekaran akan membuat terbatasnya sumberdaya yang bisa diambil sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan yang diterima, dan berdampak positif bagi daerah hasil pemekaran.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada PDRB perkapita kabupaten/kota. Laju pertumbuhan penduduk diatas laju pertumbuhan provinsi hanya terdapat pada Batam, Bengkalis, Kampar dan Pelalawan. Diperkirakan dimasa yang akan datang sesuai dengan semakin berkembangnya sebuah daerah, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Daerah-daerah yang sebelum pemekaran tidak tersentuh pembangunan, berangsur-angsur akan menjadi padat. Kalau hal ini yang terjadi, maka distribusi penduduk akan lebih merata, dari yang padat penduduk akan berpindah ke kabupaten/kota hasil pemekaran. Jika pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada PDRB, maka PDRB/kapita akan semakin kecil. Begitu sebaliknya. Karena PDRB/kapita diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari tabel 4.2 terlihat bahwa Batam dengan pertumbuhan PDRB paling tinggi (10,29%), tetapi karena diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang juga tinggi (14,56%), Batam memperoleh pertumbuhan PDRB/kapita yang negative yaitu -3,73%.

Laju pertumbuhan PDRB/kapita yang paling tinggi tahun 1993-2003 terdapat pada Pekanbaru 3,69% dan Kuansing yaitu 3,88% karena Kuansing memiliki PDRB yang jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduknya. Terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan PDRB/kapita yang negative, selain Kepri yang disebabkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang negative, Batam, Pelalawan dan Kampar disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang memang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 2: Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Perkapita dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 1993-2003

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan		PDRB Perkapita		Pertumbuhan 1993-2003
		PDRB	Penduduk	1993	2003	
1	Kuansing	6.63	2.61	1,002.02	1,466.23	3.88
2	Inhu	4.93	2.52	1,327.52	1,683.02	2.40
3	Inhil	4.58	2.36	1,268.98	1,572.83	2.17
4	Pelalawan	5.5	5.67	1,527.41	1,502.87	(0.16)
5	Siak	6.21	3.13	1,479.47	1,984.93	2.98
6	Kampar	5.7	5.86	1,069.27	1,045.98	(0.22)
7	Rohul	5.18	4.67	853.72	896.12	0.49
8	Bengkalis	5.69	6.62	1,313.00	1,738.48	2.85
9	Rohil	5.4	2.91	1,141.36	1,448.95	2.41
10	Kepri	-4.55	3.13	2,001.22	922.69	(7.45)
11	Karimun	6	2.96	1,751.88	2,343.85	3.09
12	Natuna	4.55	1.41	1,061.95	1,440.31	
13	Lingga				1,207.98	3.69
14	Pekanbaru	7.24	3.42	1,666.73	2,394.45	(3.73)
15	Batam	10.29	14.56	9,631.55	6,586.23	2.79
16	Dumai	6.24	3.36	1,373.59	1,808.23	
17	Tanjung Pinang				2,900.31	
		6.94	4.87	28,469.66	32,943.46	1.47

Sumber: BPS, Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Menurut Sektor Tahun 2004

Kemiskinan di Provinsi Riau

Kemiskinan merupakan masalah kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berkaitan, diantaranya pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kemiskinan juga harus dipahami sebagai tidak hanya ketidakmampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perlakuan bagi

Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau 658.000 penduduk atau sekitar 14,67% dari seluruh jumlah penduduk yang tersebar di desa dan di kota, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Provinsi Riau, 1993-2003.

Tahun	Kota		Desa		K + D	
	(000)	%	(000)	%	(000)	%
1993*	81,589	6,65	329,254	13,49	410,853	11,20
1996*	72,280	5,10	24,978	9,46	322,018	7,94
2001	141,41	7,19	505,89	18,38	647,30	14,32
2002	148,84	9,40	511,23	20,79	660,07	14,81
2003	147,90	9,34	510,70	20,08	658,60	14,67

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 & Statistik Indonesia Tahun 1996

Kemiskinan di Provinsi Riau merupakan akumulasi dari kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/Kota. Selama tahun 1993-2003 jumlah dan persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin, terutama setelah krisis ekonomi merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi Riau untuk lebih memperhatikan masalah kemiskinan. Dimana data ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Riau belum memberikan perhatian atau tata kelola yang serius terhadap masalah ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 1993-2003 berjumlah 6,94%, hal ini tidak terlepas dari peran tiap sektor yakni sektor industry 10,04%, listrik 8,55% dan pengangkutan 7,99%. Jika dikelompokkan lebih umum lagi selama tahun 1993 kontribusi sektor A turun dari 20,08% menjadi 17,78% sedangkan sektor M dan S menunjukkan angka lebih baik. Tahun 2003 kontribusi sektor M menjadi 43,94% meningkat sebanyak 18,34% dari tahun 1993 hanya 25,60% sedangkan sektor S relative sedikit turun dari 18,50% menjadi 17,93%. Jika dilihat dari distribusi tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor A makin lama akan semakin berkurang sebagai konsekwensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya sebuah daerah maka terjadi pergeseran tenaga kerja yang sebelumnya banyak bekerja di sektor A beralih ke sektor M dan S yang dianggap menjanjikan pendapatan lebih tinggi.
2. Jika dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, maka jumlah dan persentase penduduk miskin sebelum krisis tahun 1993 dan 1996 telah menunjukkan penurunan, akan tetapi pasca 1997 semakin bertambah. Dari data yang diperoleh ternyata penduduk miskin lebih banyak berada didesa daripada dikota, hal ini disebabkan penduduk didesa lebih banyak yang bekerja disektor pertanian yang bersifat tradisonal. Dan sesuai dengan data kemiskinan tahun 2003 jumlah penduduk miskin yang paling banyak adalah dari sektor A (67,49%), kemudian sektor S (21,40%) sementara sektor M hanya 4,11%.

Saran

1. Untuk pertanian, perlu diupayakan peningkatan SDM melalui penyuluhan, pendidikan dan bantuan alat-alat yang digunakan dalam produksi. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih memihak kepada petani. Dan memperhatikan sistim distribusi sector pertanian. Karena yang selama ini terjadi,

meskipun harga jual produk pertanian meningkat, tetap saja petani tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.

2. Untuk sector industry, diharapkan tidak hanya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja. Pergeseran tenaga kerja dari sector pertanian ke industry hanya mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang memang sudah ditetapkan. Industri yang dibangun hendaknya tidak langsung industry besar, yang butuh biaya dan teknologi yang canggih, tapi memperbanyak industry yang bersifat menengah kebawah, karena tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak harus memiliki kualifikasi yang relative tinggi, yang memang masih relative sedikit dimiliki oleh Provinsi Riau.
3. Mengingat Riau adalah Provinsi yang kaya akan sumberdaya alam, maka diharapkan Pemerintah Provinsi Riau memberikan prioritas lebih terhadap upaya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Karena perhatian yang terfokus kepada mengejar pertumbuhan dengan prioritas yang lebih kepada sector industry, akan menyebabkan semakin bertambahnya penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif, 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta
- Esmara, Hendra, 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Gupta, Syamaprasad, 1977, *A Model Income Distribution Employment and Growth*, A case study Indonesia, world bank, John Hapkins, University press, Baltimore
- Jhingan, M.L, 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah D.Guritno, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mubyarto, 2002, Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah, *Jurnal Fakultas Ekonomi UGM*, Terakreditasi, Vol 1-no1-Maret 2002.
- Remi, Soemitro,S dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Seswandi, Agus, 2004, Analisis Peranan Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar dan Kepulauan Riau di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1.No1 Fakultas Ekonomi UNILAK, Pekanbaru.